

SENGKETA HASIL PEMILIHAN PRESIDEN 2024 DI MAHKAMAH KONSITUSI: ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MEDIA LOKAL JAWA TENGAH SUARA MERDEKA DAN SOLOPOS

Linda Trilestari¹, Kevin Rohman Nurfaizi², Dani Kurniawan³, Ahmad Muntaha⁴

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Klaten,

⁴STIKOM Yogyakarta

Email: lindatari521@gmail.com

Abstract

The study investigates how Solo Post and Voice Merdeka, two local media outlets, interpret and discredit the 2024 presidential election outcome. They used Robert N. Entman's framing concept. In Indonesia, the presidential election has raised a lot of controversy, especially with regard to the Constitutional Court's decision on the election results. The purpose of framing analysis is to study how the media frames publicly received communications and how it affects people's perceptions of justice and integrity during the democratic process. The results showed that Merdeka's voice remained neutral, and Solo Post was more likely to broadcast news with a positive or supportive perspective on the 02. The study provides an excellent understanding of the role of the media in the political and legal context in Indonesia and emphasizes the importance of framing analysis to understand how the media shapes public understanding of social reality.

Keywords: Framing, Robert N. Entman, Pilpres 2024, Dispute Outcome, Local Media

Abstrak

Studi ini menyelidiki cara Solo Pos dan Suara Merdeka, dua media lokal, menginterpretasikan dan membingkai sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Mereka menggunakan konsep framing Robert N. Entman. Di Indonesia, pemilihan presiden menimbulkan banyak kontroversi, terutama terkait keputusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil pemilihan. Tujuan analisis framing adalah untuk mempelajari bagaimana media membingkai pemberitaan yang diterima publik dan bagaimana hal itu memengaruhi persepsi orang tentang keadilan dan integritas selama proses demokrasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Suara Merdeka tetap netral, dan Solo Pos lebih cenderung menyiarkan berita dengan sudut pandang yang positif atau mendukung pada kandidat 02. Studi ini memberikan pemahaman yang sangat baik tentang peran media dalam konteks politik dan hukum di Indonesia serta menekankan betapa pentingnya melakukan analisis framing untuk memahami bagaimana media membentuk pemahaman masyarakat tentang realitas sosial.

Kata Kunci : Framing, Robert N. Entman, Pilpres 2024, Sengketa Hasil, Media Lokal

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perjalanan bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga melibatkan peristiwa penting seperti pemilihan presiden (Pilpres).[1] Pilpres 2024 bukan hanya tentang memilih pemimpin selama lima tahun ke depan, tetapi juga mencerminkan kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia. Tingginya partisipasi masyarakat dalam Pilpres menunjukkan pentingnya peristiwa ini bagi masa depan bangsa. Namun, proses Pilpres sering kali diwarnai

masalah, termasuk sengketa hasil pilpres yang dapat memengaruhi stabilitas politik dan sosial.

Kontroversi seputar hasil Pilpres 2024 mencuat setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. [2] Keputusan ini menjadi topik hangat di media massa, terutama media lokal seperti Solo Pos dan Suara Merdeka. Media massa merupakan sekumpulan perangkat yang digunakan untuk mengirimkan informasi dari komunikator kepada komunikan. Oleh karena itu, media massa harus mempertimbangkan elemen-elemen penting yang berperan dalam komunikasi massa.[3] Pemingkatan media dalam pemberitaan memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses demokrasi.

Framing adalah proses di mana media memilih aspek-aspek tertentu dari realitas dan menonjolkannya dalam pemberitaan, membentuk cara pandang audiens terhadap isu tersebut. [4]. Salah satu framing temuan Robert N. Entman yaitu ada framing yang melibatkan empat elemen utama: mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, membuat penilaian moral, dan menyarankan solusi.[5] Dalam kasus sengketa hasil Pilpres 2024, framing media dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap validitas hasil pemilu dan integritas proses demokrasi.

Pelaksanaan Pilpres juga memicu banyaknya berita yang disebarkan oleh berbagai media, termasuk media lokal seperti Solo Pos dan Suara Merdeka. Banyaknya pemberitaan ini menciptakan berbagai bentuk penyampaian yang dapat mempengaruhi cara pandang pembaca. Analisis framing menjadi alat penting untuk memahami bagaimana media membentuk narasi dan pemahaman publik tentang peristiwa tersebut.

Studi ini bertujuan menganalisis bagaimana media lokal membingkai pemberitaan mengenai sengketa hasil Pilpres 2024 menggunakan model framing Robert N. Entman. Dengan memahami teknik framing yang digunakan, kita dapat mengidentifikasi bias dalam pemberitaan dan memahami dampaknya terhadap persepsi publik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berharga dalam studi media dan komunikasi politik, serta membantu meningkatkan kualitas pemberitaan media di masa depan.

Adapun penelitian terdahulu serupa seperti penelitian yang berjudul “ANALISIS FRAMING PADA PEMBERITAAN KEBIJAKAN GANJAR PRANOWO “JATENG DI RUMAH SAJA” DI MEDIA ONLINE KOMPAS.COM DAN SUARA MERDEKA.COM” yang ditulis oleh gina kusuma bhakti mengenai isu kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Jawa Tengah, sedangkan Suara Merdeka.com menonjolkan isu terkait pro dan kontra kebijakan “Jateng di Rumah Saja” yang diusulkan Ganjar Pranowo[6]. Penelitian kedua berjudul “(Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Nilai-Nilai Budaya Dalam Kasus Pembongkaran Pabrik Es Saripetojo Di Harian Umum Suara Merdeka Dan Harian Joglosemar Periode 16 Juni – 18 Juli 2011)” yang ditulis puji hartono mengenai pembongkaran pabrik Es Saripetojo memiliki Kecenderungan bahwa bangunan tersebut harus dilindungi, meski pada saat itu belum ada keputusan pasti dari BP3 Jawa Tengah terkait status bangunan[7]. Hal tersebut menjadikan penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan topik penelitian belum pernah diteliti sebelumnya. Sehingga penelitian ini bisa menghasilkan pembaruan dari penelitian terdahulu yang bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang analisis pemberitaan hasil sengketa pilpres 2024 pada media lokal solopos dan suara merdeka.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah framing Solopos dan Suara Merdeka memberitakan Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi komparasi bagaimana media lokal solo pos dan suara merdeka dalam membingkai pemberitaan sengketa hasil Pilpres 2024 dengan menggunakan model framing Robert N. Entman.

DEFINISI KONSEP VARIABEL

Kajian Teori

1. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia sendiri pada hakekatnya merupakan sarana pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.[8]

2. Sengketa Pemilu

Sengketa pemilu merupakan proses untuk menyelesaikan dan mengatasi pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Pelanggaran ini dapat berupa pelanggaran administratif maupun pidana, dan dapat terjadi pada berbagai tahap pemilu, mulai dari perencanaan, persiapan, hingga penghitungan suara.[9]

3. Solo Pos

Surat kabar Solopos diterbitkan setiap hari di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Harian ini pertama kali diterbitkan pada September 1997. Penerbitnya adalah PT Aksara Solopos, yang juga memiliki saham dalam Percetakan PT Solo Grafika Utama, Radio Solopos FM, dan tabloid olahraga Arena. Tabloid olahraga Arena tidak diterbitkan lagi sejak bulan Mei/Juni. PT Jurnalindo Aksara Grafika, penerbitan harian Bisnis Indonesia, adalah pemilik 80% saham di koran terbesar di bekas Karesidenan Surakarta. Menurut Wikipedia, selebihnya dimiliki oleh karyawan PT Aksara Solopos[10].

4. Suara Merdeka

Hetami dan edisi pertamanya terbit pada 11 Februari 1950. Hetami dibantu oleh tiga wartawan: HR. Wahjoedi, Soelaiman, dan Retno Koestiyah. Koran ini pertama kali diterbitkan di Solo dengan tiras 5.000 eksemplar, lalu menyebar ke Kudus dan Semarang. Pada awalnya, Suara Merdeka bergantung pada De Locomotief untuk percetakan. Sejak 1956, setelah Hetami mendapatkan mesin cetak sendiri, Suara Merdeka mulai terbit pagi hari. Kantor pertama mereka terletak di bekas kantor Het Noorden yang dibeli pemerintah Indonesia pada Maret 1963. Pada 11 Februari 1982, Suara Merdeka membuka kantor baru dan percetakan Mascom Graphy di Semarang. Pada saat itu, kepemimpinan diserahkan kepada menantu Hetami, Budi Santoso. Sejak 2010, Suara Merdeka dipimpin oleh Kukrit Suryo Wicaksono, anak sulung Budi Santoso[11].

5. Framing Model Robert N. Entman

Framing adalah penunjukan poin penting dalam berita untuk membingkai dan mempengaruhi perspektif publik sesuai dengan kepentingan media. Karena berita terkait erat dengan budaya kelompok tertentu, informasi atau pesan teks akan dikonstruksi sesuai kepercayaan khalayak dan menghasilkan pandangan tertentu. Model analisis framing oleh Robert N. Entman dalam buku Eriyanto "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik" mencakup empat tahapan:

1. Define problem: Bagaimana media menggambarkan suatu peristiwa dan apa penyebab masalahnya.
2. Diagnose causes: Apa yang dianggap sebagai penyebab masalah.
3. Make moral judgement: Nilai moral yang digunakan untuk menjelaskan masalah.
4. Treatment recommendation: Penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi masalah[12].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data berupa kata-kata dan tulisan. Metode ini lebih menonjolkan proses dan makna, dengan penulis sebagai instrumen kunci dan fokus pada observasi dalam suasana alamiah. Deskriptif tidak mencari hubungan, menguji hipotesis, atau membuat prediksi, tetapi lebih menekankan pada pengamatan[13].

Penelitian ini juga mengombinasikan teknik analisis framing menurut Robert N. Entman, yang menunjukkan poin-poin penting dalam berita untuk membingkai dan mempengaruhi perspektif publik. Karena berita sangat terkait dengan budaya kelompok tertentu, informasi akan dikonstruksi sesuai kepercayaan khalayak. Entman mengkaji framing berdasarkan empat cara: Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgment, dan Treatment Recommendation.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan semua pemberitaan seputar sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi selama periode 8 April hingga 22 April 2024. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data menggunakan Model Analisis Robert N. Entman. Penelitian ini mengkaji framing pemberitaan sengketa

hasil Pilpres oleh media lokal, seperti Solo Pos dan Suara Merdeka, yang menyampaikan berita dengan cara berbeda dan mempengaruhi cara pandang pembacanya.

HASIL & PEMBAHASAN

Pada media Solo Pos ditemukan pemberitaan dalam periode 8 April hingga 22 April 2024, membahas berbagai aspek penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2024, menekankan pentingnya integritas dan keadilan untuk menjaga legitimasi hasil pemilu. Amicus curiae yang diajukan oleh Megawati kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap sebagai langkah penting untuk mendapatkan dukungan moral. Sikap bijak Prabowo Subianto, yang mengimbau pendukungnya untuk tidak melakukan aksi damai, juga menjadi sorotan, menunjukkan kepedulian terhadap stabilitas bangsa. Transparansi hukum dan stabilitas pemerintahan ditekankan dengan upaya Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka mengakomodasi partai politik non-koalisi dalam kabinet.

Analisis Solo Pos menyoroti pentingnya proses yang adil dan transparan dalam penyelesaian sengketa Pilpres 2024, serta peran MK dalam menjaga integritas pemilu. Media ini menekankan pentingnya menghormati proses hukum dan keputusan MK untuk menjaga stabilitas dan kemajuan demokrasi Indonesia. Langkah-langkah hukum yang diambil oleh tim Prabowo-Gibran dan peran penting MK juga ditekankan sebagai faktor utama dalam penyelesaian sengketa.

Partisipasi amicus curiae oleh MK serta pernyataan tokoh politik seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menekankan pentingnya keadilan, integritas, dan kepercayaan publik dalam proses peradilan. MK menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menolak eksepsi yang diajukan oleh KPU dan tim Prabowo-Gibran, meskipun ada ketidakpercayaan dari beberapa tokoh dan dissenting opinion dari Hakim Arief Hidayat yang menunjukkan kekhawatiran terhadap potensi ketidakadilan.

Pemberitaan Solo Pos juga menekankan nilai-nilai moral seperti keadilan, integritas, dan transparansi dalam penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2024. Prabowo Subianto digambarkan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, menunjukkan komitmen terhadap persatuan nasional dan stabilitas politik. Transparansi dan keadilan dalam proses peradilan

MK menjadi fokus utama, dengan penekanan pada pentingnya menjaga demokrasi dan hak-hak politik setiap warga negara.

Rekomendasi Solo Pos mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses hukum guna menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Putusan MK diharapkan mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, dengan masyarakat didorong untuk menghormati dan menerima hasil keputusan MK guna menjaga stabilitas dan persatuan nasional. Perbaikan sistemik diusulkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum seperti MK, termasuk reformasi dalam mekanisme pengawasan dan pelaksanaan pemilu.

Tabel . Framing media solopos mulai edisi 8 april hingga 22 april 2024

ELEMEN FRAMING	MEDIA SOLOPOS
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. Integritas dan keadilan proses penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2024. Surat Amicus Curiae yang diajukan oleh Megawati kepada MK. - Sikap bijak dan mengutamakan kepentingan bangsa oleh Prabowo Subianto. Integritas dan transparansi proses hukum dalam penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2024. - Upaya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Menghormati proses hukum dan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. - Pasangan 02 yang mengubah syarat umur pencalonan untuk memungkinkan Gibran mencalonkan diri. - Skeptisisme terhadap potensi perubahan hasil Pilpres 2024 - Peran amicus curiae

	11. Independensi dan objektivitas MK memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024. 12. Tudingan pelanggaran ditangani dengan adil. 13. Tindakan cepat KPU dalam menindaklanjuti Putusan MK 14. Kritik dan ketidakpercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil Pilpres 2024. 15. Adanya perbedaan pendapat di antara hakim MK terkait putusan sengketa hasil Pilpres 2024. 16. Reaksi dari kubu Gibran-Prabowo setelah penolakan gugatan PHPU oleh MK. 17. Penyelesaian sengketa Pilpres 2024 dan penerimaan hasil putusan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 3. 18. Menghormati proses hukum dan keputusan Mahkamah Konstitusi 19. Koordinasi dan respons yang tepat dari pasangan calon terpilih terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilpres 2024. 20. Penghormatan terhadap proses hukum dan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. 21. Penghormatan terhadap proses hukum dan pendapat berbeda dari para hakim konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. 22. Menghormati prinsip MK dan integritas dalam penyelenggaraan penyelesaian sengketa hasil pilpres 2024.
<i>Diagnose Causes</i> (Identifikasi Penyebabnya)	1. Penyerahan kesimpulan oleh tim hukum Prabowo-Gibran ke MK 2. Pengajuan amicus curiae. 3. Ziarah ke Makam RA Kartini digunakan sebagai simbol harapan agar putusan MK. 4. Menjaga kondusifitas dan kesejukan demokrasi serta mendukung proses hukum yang sedang berjalan di MK. 5. Dukungan publik dan kepercayaan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung di MK.

	6. Penekanan pada hak prerogatif presiden 7. Kesiapan Bawaslu untuk melaksanakan putusan MK 8. Potensi konflik kepentingan dan masalah kredibilitas dalam keputusan MK. 9. Adi Prayitno mengemukakan bahwa putusan MK tidak mungkin mengubah hasil Pilpres 2024, 10. Partisipasi pihak amicus curiae 11. Menyoroti pernyataan Ganjar Pranowo, Muhaimin Iskandar, dan Anies Baswedan, berita ini menekankan pentingnya keadilan, integritas, dan kepercayaan publik dalam proses peradilan yang dijalankan oleh MK. 12. Keputusan MK untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh KPU dan Prabowo-Gibran 13. Komitmen KPU dan MK 14. Din Syamsuddin dan organisasi Presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) secara terbuka menyuarakan ketidakpercayaan mereka terhadap proses dan hasil keputusan MK. 15. Dissenting opinion dari Hakim potensi ketidakadilan dalam proses pemilihan. 16. Ketidakpastian langkah selanjutnya dan menunggu arahan dari Prabowo Subianto. 17. Menghormati proses hukum dan keputusan MK 18. Penerimaan keputusan MK oleh semua pihak terkait dan komitmen untuk memajukan masa depan bangsa Indonesia. 19. - 20. Penerimaan keputusan MK oleh semua pihak yang terlibat dinamika peradilan. 21. Apresiasi terhadap dissenting opinion sebagai langkah penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. 22. Kritik terhadap tindakan partisan pemerintahan yang dianggap mencederai keadilan pemilu.
--	--

<i>Make Moral</i> <i>Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	1. Berita ini cenderung informatif dan netral 2. menunjukkan betapa krusialnya keadilan dalam proses pemilihan 3. Pentingnya menjaga demokrasi dan keadilan dalam proses hukum. 4. Berita ini memperlihatkan Prabowo sebagai pemimpin yang bertanggung jawab 5. Proses penyelesaian sengketa pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. 6. Berita ini memberikan gambaran positif tentang langkah-langkah yang diambil oleh Prabowo-Gibran. 7. Tanggung jawab dan komitmen lembaga pemilu 8. Mencerminkan kritik terhadap MK yang dinilai pragmatis dan tidak berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer. 9. Kritik terhadap sistem peradilan pemilu 10. Upaya MK untuk menjalankan peran dan fungsi hukumnya 11. Keputusan yang adil dan tidak berpihak. 12. Kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan tanggung jawab kolektif. 13. Respons cepat dan koordinasi MK 14. Pandangan bahwa ada kekurangan dalam sistem hukum dan proses pengambilan keputusan. 15. Pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses pemilu 16. Kepemimpinan dan koordinasi. 17. Menjaga integritas proses pemilu dan menyoroti tantangan-tantangan besar yang perlu segera diselesaikan oleh bangsa. 18. Nilai-nilai demokrasi, integritas lembaga hukum, dan tindakan proaktif dalam menjaga stabilitas nasional. 19. Menjaga konsistensi dalam komunikasi publik 20. - 21. -
---	---

	22. Pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, dan integritas lembaga hukum dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.
<i>Treatment Recommendation</i> (memberi perlakuan/saran).	1. Rekomendasi perbaikan yang spesifik. 2. Mengimplikasikan perlunya transparansi dan keadilan proses hukum untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. MK memberikan putusan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. 4. – 5. Mendorong masyarakat untuk menghormati dan menerima hasil keputusan MK. 6. Mencapai stabilitas dan persatuan nasional. 7. Menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. 8. Penekanan pada sejarah diskualifikasi kandidat. 9. Ada keraguan tentang perubahan substansial dalam hasil Pilpres, 10. Keadilan hukum dan demokratis. 11. Menjaga demokrasi dan hak-hak politik setiap warga Negara. 12. Menjaga proses demokrasi yang sehat di Indonesia. 13. – 14. Perbaikan sistemik dan peningkatan transparansi 15. Perbaikan sistem pengawasan dan pelaksanaan pemungutan suara. 16. Perbaikan mencakup kebutuhan untuk menunggu arahan lebih lanjut. 17. Perbaikan mencakup penerimaan hasil dengan sportifitas. 18. Perbaikan mencakup penghormatan terhadap proses hukum, 19. Perbaikan mencakup koordinasi yang lebih baik dan komunikasi yang transparan dalam menghadapi hasil pemilu yang kontroversial. 20. Perbaikan mencakup penghormatan terhadap proses hukum, 21. Perbaikan mencakup penghormatan terhadap dissenting opinion,

22. –

Sedangkan dalam Pendefinisian masalah dalam berita Suara Merdeka menyoroti pentingnya bukti yang kuat dalam proses hukum sengketa Pilpres 2024. Bukti yang tidak memadai dapat merusak kredibilitas klaim dan mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Polri juga berperan dalam menjaga ketertiban selama sidang, memastikan proses hukum berjalan aman dan tertib. Presiden terpilih diharapkan memberikan arahan yang jelas untuk mencegah kerusakan pasca putusan MK.

Menghormati proses hukum dan keputusan MK penting untuk menjaga integritas demokrasi dan stabilitas politik Indonesia. Ketidakpatuhan terhadap keputusan MK bisa menimbulkan krisis legitimasi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan berkomitmen untuk menghormati proses hukum dan mendidik publik tentang pentingnya supremasi hukum.

Berita Suara Merdeka Solo juga mengidentifikasi beberapa penyebab sengketa Pilpres 2024. Keputusan MK yang menolak dalil Paslon 01 disebabkan oleh kurangnya bukti yang memadai. Selain itu, upaya pencegahan ancaman oleh Polri menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas selama sidang berlangsung.

Penekanan pada komunikasi dan kerjasama politik serta penerimaan keputusan MK oleh Prabowo Subianto penting dalam menjaga stabilitas politik. Sikap sportif dan tanggung jawab yang ditunjukkan Prabowo membantu mengurangi ketegangan politik dan sosial serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan hukum di Indonesia.

Berita Suara Merdeka Solo juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan transparansi dalam proses hukum serta peran vital Polri dalam menjaga ketertiban nasional. Menegakkan keadilan dan transparansi adalah fondasi dalam proses hukum. Tindakan Polri membantu memastikan proses hukum dan demokrasi tidak terganggu. Sikap positif dan konstruktif yang ditunjukkan oleh Gibran dianggap sebagai contoh kepemimpinan yang bijak, membantu meredakan ketegangan, dan mendorong dialog konstruktif.

Tabel . Framing media suara merdeka

ELEMEN FRAMING	MEDIA SUARA MERDEKA
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	1. Bukti yang kuat dan valid dalam proses hukum terkait sengketa Pilpres 2024. 2. Langkah keamanan oleh Polri menjaga ketertiban selama sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di MK. 3. Ketidakpastian pasca putusan MK . 4. Pentingnya menghormati proses hukum dan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilpres 2024
<i>Diagnose Causes</i> (Mencari/identifikasi penyebab-penyebabnya).	1. Keputusan MK yang menolak dalil-dalil kubu Paslon 01 karena tidak didukung oleh bukti yang memadai. 2. Upaya pencegahan ancaman melalui pengerahan personel dan anjing pelacak. 3. Penekanan pada komunikasi dan kerjasama politik. 4. Penerimaan keputusan MK oleh Prabowo Subianto dan komitmennya untuk mempersiapkan masa depan bangsa.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	1. Pentingnya prinsip keadilan dan transparansi dalam proses hukum dan memahami tindakan sebagai pelanggaran. 2. Prinsip keamanan dan ketertiban . 3. Sikap positif dan konstruktif dari Gibran dalam menghadapi situasi politik yang sedang berlangsung. 4. Demokrasi, integritas lembaga hukum, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan nasional
<i>Treatment Recommendation</i> (memberi perlakuan/saran).	1. Penyajian bukti yang lebih kuat dan konkret . 2. Penerapan langkah-langkah keamanan yang komprehensif dan kondusif. 3. - 4. Penghormatan terhadap proses hukum .

Analisis framing Robert N. Entman tentang pemberitaan sengketa hasil Pilpres 2024 di Solo Pos dan Suara Merdeka mengungkapkan beberapa aspek penting. Tahapan penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan integritas dan keadilan untuk menjaga kepercayaan publik. Analisis menyoroti peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga integritas pemilu, menangani semua tuduhan pelanggaran secara adil, serta pentingnya menghormati proses hukum dan keputusan MK demi stabilitas dan kemajuan demokrasi Indonesia seperti pada gambar tabek dibawah ini. .

Tabel . Perbedaan Framing media Solopos dan suara merdeka

Framing Robert N. Entman	Solo Pos	Suara Merdeka
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2024 melibatkan upaya menjaga integritas dan keadilan melalui peran Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum, dengan dukungan surat Amicus Curiae, sikap bijak Prabowo Subianto, dan koordinasi pasangan calon terpilih untuk stabilitas, meskipun ada kritik dan perbedaan pendapat, menekankan pentingnya independensi lembaga hukum untuk memelihara kepercayaan publik terhadap demokrasi Indonesia.	Proses Keputusan MK pada sengketa pilpres.
<i>Diagnose Causes</i> (Mencari/identifikasi penyebab-penyebanya).	Penyerahan kesimpulan tim hukum Prabowo-Gibran ke MK, pengajuan amicus curiae, dan dukungan publik menekankan pentingnya keadilan dan integritas dalam proses peradilan, sementara kritik, dissenting opinion, dan potensi konflik	Keputusan Mahkamah Konstitusi

	kepentingan menggarisbawahi tantangan dalam keputusan MK terkait Pilpres 2024.	
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Berita ini menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan integritas dalam proses pemilihan serta tanggung jawab lembaga pemilu dan kritik terhadap sistem peradilan, sambil menggambarkan langkah-langkah positif dan kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam menjaga demokrasi dan stabilitas nasional.	Prinsip dalam proses hukum
<i>Treatment Recommendation</i> (memberi perlakuan/ saran).	Rekomendasi perbaikan menekankan perlunya transparansi, keadilan, dan sistem pengawasan yang lebih baik untuk menghindari konflik kepentingan, sambil mendorong masyarakat untuk menerima hasil keputusan MK dengan sportif dan menjaga demokrasi serta stabilitas nasional.	Penyajian bukti dalam proses hukum

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil analisis berita sengketa pemilu antara solo pos dan suara merdeka yang dimuat mulai dari tanggal 08 april 2024 sampai 22 april 2024 menunjukan solo pos memiliki kecenderungan framing positif atau dukungan terhadap calon presiden prabowo dan gibran sementara itu suara merdeka memiliki sikap yang netral dalam pemilihan presiden tahun 2024. hal ini dapat ditunjukan dari hasil ringkasan analisis framing model Robert N. Entman yang telah dipaparkan diatas. Perbedaan yang paling signifikan adalah jumlah pemebritaan yang diberitakan yaitu media solopos ditemukan ada 22 berita mengenai sengketa hasil pilpres 2024 serta sebagian besar isi pemberitaan condong menyorot paslon 02 sedangkan media suara merdeka ditemukan hanya ada 4 pemberitaan mengenai sengketa hasil pilpres 2024 dengan isi berita yang cenderung netral dalam pemingkaian beritanya.

DAFTAR PUSTAKA

- N. F. R. Ika Krismantari, "Pemilu 2024 akan jadi pesta demokrasi terbesar di dunia: 5 hal yang perlu kamu ketahui," *Academic rigor, journalistic flair*, 2023. [Online]. Available: <https://theconversation.com/pemilu-2024-akan-jadi-pesta-demokrasi-terbesar-di-dunia-5-hal-yang-perlu-kamu-ketahui-211069>
- Shinta, "Sah! AMIN dan Ganjar-Mahfud Gugat Hasil Pilpres 2024 ke MK," *beritahukum*, 2024. [Online]. Available: <https://beritahukum.id/1691/berita/sah-amin-dan-ganjar-mahfud-gugat-hasil-pilpres-2024-ke-mk/>
- I. P. dkk Hadi, *Buku ajar Komunikasi Massa*. 2021. [Online]. Available: [https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/17579/Buku_Ajar_Komunikasi_Bisnis_\(ABKA_3208-2_SKS\).pdf?sequence=1](https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/17579/Buku_Ajar_Komunikasi_Bisnis_(ABKA_3208-2_SKS).pdf?sequence=1)
- John L. Capinera, "ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PERMENDIKBUD TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DI MEDIA ONLINE," *Block Caving – A Viable Altern.*, vol. 21, no. 1, pp. 1–9, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A??>
- G. GOOD, "BAB I PENDAHULUAN A.," *Angew. Chemie Int. Ed.* 6(11), 951–952., vol. 1, no. April, pp. 1–29, 2015.
- G. K. Bhakti, "Analisis Framing Pada Pemberitaan Kebijakan Ganjar Pranowo" Jateng di Rumah Saja" di Media Online Kompas. com dan Suara Merdeka. com," 2022.
- M. Cetak *et al.*, "MEDIA CETAK DAN KASUS PEMBONGKARAN PABRIK ES SARIPETOJO (Analisis," 2013.
- D. Mulyadi, "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu," *J. Ilm. Galuh Justisi*, vol. 7, no. 1, p. 14, 2019, doi: 10.25157/jigj.v7i1.2144.
- V. Nomor, J. Desember, and A. Fauzi, "EKSAMINASI PUTUSAN MK NO. 97/PUU-X I/2013 Akre (PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA LANGSUNG) Taufiqurrohman," vol. 6, no. 5, pp. 396–405, 2021, doi: 10.30596/delegalata.v6i2.6473.
- B. Megawati, "Strategi Penerbitan Dan Model Penyuntingan Di Solopos Sebagai Penopang Eksistensi Penulis Berita," *Angew. Chemie Int. Ed.*, vol. 6, no. 11, pp. 951–952, 2018.
- Wikipedia, "Sejarah Suara Merdeka," *Wikipedia*, 2024. [Online]. Available: https://id.wikipedia.org/wiki/Suara_Merdeka
- A. K. Siregar and E. F. Qurniawati, "Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di tempo.co," *J. New Media Commun.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2022, doi: 10.55985/jnmc.v1i1.1.
- S. Hanyfah, G. R. Fernandes, and I. Budiarto, "Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash," *Semnas Ristek (Seminar Nas. Ris. dan Inov. Teknol.*, vol. 6, no. 1, pp. 339–344, 2022, doi: 10.30998/semnasristek.v6i1.5697.